

SUMBANGAN DOMPET KR "COVID-19" REKENING BCA NO. : 126.556.5656 A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT
NB: SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2296.0972

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

UWM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kampus Berbasis Budaya
widyamataran.ac.id | (0274) 374-352 | PMB : 082244347597

http://www.krjogja.com

JUMAT PON

20 AGUSTUS 2021 (11 SURA 1955 / TAHUN LXXVI NO 313)

HARGA RP 4.000 / 20 HALAMAN

Vaksinasi Lindungi Ibu Hamil dan Bayi dari Covid-19

JAKARTA (KR) - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto meninjau peluncuran kegiatan Vaksinasi Ibu Hamil di Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/8). Airlangga didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Airlangga menjelaskan, Program Vaksinasi Ibu Hamil ini tidak hanya digelar di DKI Jakarta, tetapi juga di 10 provinsi dan 11 kota di Indonesia. Menteri Koordinator Bi-

dang Perekonomian ini menegaskan, vaksinasi untuk ibu hamil dibutuhkan untuk menjaga keselamatan generasi penerus Indonesia. Ia mengaku Pemerintah telah menyusun kebijakan vaksinasi bagi ibu hamil dengan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) dan masukan BKKBN, IBI dan POGI. Ibu hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi Covid-19, khususnya dengan kondisi medis tertentu. Tingginya risiko tersebut berdampak pada ke-



Airlangga Hartarto didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan vaksinasi untuk ibu hamil.

hamilan dan bayinya. "Vaksinasi bisa melindungi ibu hamil dan bayinya dari infeksi Covid-19," tegas Airlangga. Menko Perekonomian menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil mengerahkan badan sebagai vaksinator. Airlangga mengapresiasi inisiatif POGI, BKKBN, IBI, Salim Grup dan berbagai pihak dalam kegiatan Deklarasi Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil Indonesia. Menurutnya, vaksinasi terhadap ibu hamil menja-

di salah satu akselerasi atau percepatan agar Indonesia lekas mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). "Diharapkan banyak pengusaha terlibat sehingga ini menjadi bagian dari *social responsibility* kepada masyarakat. Karena penanganan Covid-19 ini harus dikeroyok dan dilakukan secara gotong royong, ditingkatkan serta dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia," tegas Menko Perekonomian. Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar

PELAKSANAAN PEMILU 2024 KPU Siapkan Dua Opsi Skenario

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 2024. Kedua skenario itu, menurut dia, adalah pemilu dalam situasi pandemi Covid-19 dan pemilu dalam situasi normal. "Hal itu diperlukan sebagai antisipasi berbagai risiko, apabila pandemi belum berakhir. Karena pada Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi dan kita belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 selesai," kata Guspari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/8). Menurut Guspari, dua skenario tersebut akan berdampak pada penambahan anggaran pemilu, misalnya pada Pilkada 2020, DPR RI sudah memfasilitasi dan meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran. Ia mengatakan hal yang sama juga akan diterapkan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 apabila pandemi tidak kunjung usai, maka akan ada penambahan anggaran seperti untuk penerapan protokol kesehatan.

* Bersambung hal 7 kol 5

Kominfo Blokir 3.856 Platform Akses Pinjol Ilegal Diputus

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya memutus akses ke perusahaan teknologi finansial *peer-to-peer* 'lending' atau pinjaman online (pinjol) ilegal demi melindungi masyarakat. "Untuk memastikan perlindungan masyarakat pengguna jasa pinjaman online dilakukan melalui langkah komprehensif. Termasuk yang paling tegas, pemutusan akses terhadap penyelenggara *peer-to-peer* lending fintech yang melaksanakan kegiatannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu, kami juga melakukan upaya literasi digital," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate saat webinar 'Mewaspadai Jeratan Pinjaman Online Ilegal', seperti dikutip dari siaran pers Kominfo, Kamis (19/8). Jasa pinjaman online ilegal ini harus diatasi karena mengganggu ruang digital. Blokir pinjaman online ilegal dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi lembaga lainnya, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data per 17 Agustus, sudah ada 3.856 platform tekfin ilegal yang diblokir, termasuk jenis *peer-to-peer* lending. Upaya memberantas *peer-to-peer* lending ilegal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya dengan memutus akses. Selain memblokir tekfin ilegal, pemerintah berupaya membekali masyarakat dengan literasi digital agar mereka memiliki kemampuan untuk mencerna informasi yang benar dan tepat dalam menggunakan

internet. Literasi digital, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, memberikan empat kurikulum yaitu cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, etika bermedia digital dan aman bermedia digital. "Keseluruhan materi atau kurikulum ini merupakan salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat agar semakin waspada dalam menggunakan internet, termasuk pada saat memilih penyedia jasa pinjaman online dan

* Bersambung hal 7 kol 5

AKHIR OKTOBER CAPAI 100%

Vaksinasi Ditingkatkan, 20.000 Orang Perhari



Gubernur DIY Sri Sultan HB X didampingi Walikota dan Bupati se-DIY menyampaikan keterangan pers.

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Pemkab/Pemkot di DIY untuk melakukan percepatan vaksinasi. Jika saat ini capaian vaksinasi sudah mencapai 12.000 orang perhari, Sultan berharap bisa ditingkatkan menjadi 20.000 orang perhari. Dengan demikian pada September 2021 vaksinasi di DIY sudah bisa mencapai 80 persen, dan pada akhir Oktober atau awal November capaian vaksinasi di DIY diharapkan sudah 100 persen. "Intinya, bagaimana kita bisa ada percepatan vaksinasi, dari yang saat ini 12.000 sekian orang perhari menjadi 20.000 orang perhari. Sekarang kebijakannya ada di kabupaten/kota, bagaimana menghabiskan stok yang ada. Kalau mau sharing, *mangga* bagaimana maunya, yang penting percepatan vaksinasi bisa dilakukan," kata Sultan HB X usai mengadakan Rapat Evaluasi Perkembangan Penanganan

Covid-19 DIY bersama Bupati/Walikota di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (19/8). Sultan mengungkapkan, supaya percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan baik, Penda DIY akan membahas target atau sasaran secara teknis dengan kabupaten/kota. Salah satu upaya percepatan vaksinasi dengan menasar kalurahan hingga RT dan RW. Adapun caranya akan dibahas lebih detail lagi. Apakah lewat kecamatan, kalurahan atau RT, RW atau seperti sekarang yang sudah dilakukan. Nanti akan dilihat mana yang paling mudah dan cepat. "Kalau soal teknis koordinasi mungkin perlu pertemuan sendiri antara Sekda DIY dengan Pemkab/Pemkot. Perlu diketahui salah satu tujuan percepatan vaksinasi untuk menekan ketidakstabilan kasus Covid-19 di DIY yang kadang naik-turun. Karena

* Bersambung hal 7 kol 1

KPK Petakan Risiko Korupsi Bansos

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan risiko-risiko korupsi yang dapat terjadi dengan bantuan sosial (bansos). Pertama, penerima bantuan fiktif (tidak ada). KPK melihat risiko korupsi jika data penerima bantuan tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Ini bisa jadi ganda karena tidak bisa secara cepat diidentifikasi siapa yang menerima bantuan. Kalau nama kan ada M Nasir dengan Muhammad Nasir dengan Muhammad N itu bisa jadi empat orang, tetapi kalau ada NIK-nya ketahuan dia hanya satu," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat Webinar JAGA.ID dengan tema 'Bansos Dipotong Ke mana Harus Minta Tolong' melalui akun Youtube KPK, Kamis (19/8). Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menjalankan rekomendasi KPK dengan baik untuk menggabungkan tiga basis data penerima bansos. "Oleh karena itu yang Bu Risma (Tri Rismaharini/Mensos) tunjukkan dari 193 juta (penerima) turun menjadi 155 juta hanya memastikan yang tidak ada NIK-

nya. Jadi, kami bilang "ya sudah bu *pede aja* kalau tidak ada NIK-nya kemungkinan besar orangnya tidak ada". Jadi, sekarang dipastikan semua data harus ada NIK-nya. Kalau buat saya secara awam bilang kalau ada NIK-nya berarti manusianya ada di Indonesia paling tidak pernah tercatat di Indonesia," tuturnya. Kedua, tidak diperbarainya data penerima bansos. "Tahun ini ada NIK-nya benar, tetapi kan orangnya bisa meninggal, bisa cerai, bisa pindah masuk pindah keluar. Kalau yang meninggal sama lahir saya dapat bocoran dari Pak Zudan (Zudan Arif Fakrulloh/Dirjen Dukcapil Kemendagri) setahun saja sudah tiga juta orang belum yang pindah mungkin sekitar 10 juta," ucap dia. Akibat NIK tidak diperbarui tersebut, katanya, maka bantuan menjadi

* Bersambung hal 7 kol 1

Analisis KR
Malaysia Pascamuhiddin
Prof Dr Tulus Warsito

SENIN, 16 Agustus 2021 lalu, Perdana Menteri Malaysia dengan segenap menteri kabinetnya menyatakan pengunduran diri kepada Yang Dipertuan Agong. Di tengah kasus Covid-19 yang terus memuncak dan perekonomian yang memburuk, Raja Malaysia menerima pengunduran tersebut dengan berbagai spekulasi politik yang amat sulit diduga perkembangannya. Apa yang akan dilakukan oleh Sultan Abdullah, sebagai Kepala Negara, dalam penyelesaian krisis ini? Banyak media menyampaikan analisis tentang kemungkinan pemerintahan baru Malaysia. Dalam negara Monarki Konstitusional, pengunduran diri Perdana Menteri yang diterima Raja Yang Dipertuan Agong menunjukkan bahwa penyelesaian krisis politik ini sepenuhnya ada di tangan Raja. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan oleh Raja yaitu: Membentuk pemerintahan interim. Dalam kasus ini Sultan Abdullah telah menunjuk Muhyiddin membentuk pemerintahan peralihan hingga terpilihnya pemerintahan baru. Dan kedua adalah, segera menyelenggarakan pemilihan umum. Berhubungan pandemi Covid-19 masih merajalela, maka pemilu (percepatan) tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang pantas untuk menyelesaikan krisis. Maka,

* Bersambung hal 7 kol 1

Jadwal Sabat
Zuhur 11:45, Asar 15:05, Magrib 17:42, Isya 18:52, Subuh 04:29
Jumat, 20 Agustus 2021
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'
Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumrapping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972. Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
	Melalui Transfer		
1019	Muhammad Amiruddin	30.000,00
1020	Murdjiraptinah	500.000,00
JUMLAH			Rp 530.000,00
s/d 18 Agst 2021			Rp 498.374.656,00
s/d 19 Agst 2021			Rp 498.904.656,00

(Empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)
Ralat nomer urut yang benar 1020 (Siapa menyusul?)

Bagi yang sedang isoman, tapi ingin konsultasi dokter

DOCCALL
Konsultasi Dokter Melalui Video Call
HOTLINE : 08112854035

KHITAN DI RUMAH
Aman, Nyaman, Langsung Beraktivitas
Pendaftaran 0896 4321 4455

Dimanapun Berada Selalu Patuhi Prokes

DATA KASUS COVID-19	
1. Nasional:	2. DIY:
- Positif: 3.930.300 (+22.053)	- Positif: 142.075 (+1.175)
- Sembuh: 3.472.915 (+29.012)	- Sembuh: 115.889 (+2.121)
- Meninggal: 122.633 (+1.492)	- Meninggal: 4.460 (+57)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Penda DIY. (KR-Ria/Ira)

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● PADA awal tulisan SST dimuat, saya mengambil honor bersama anak saya yang masih sekolah di TK. Dia melihat saya menyerahkan foto copy KTP kepada petugas loket dan mendapat uang honor dari kasir. Ketika pulang, anak saya berkomentar, "Enak, ya.... Kertas bisa ditukarkan uang." Saat ini anak saya sudah lulus di SMP dan masih teringat pengalaman itu. (Sardjono Sadel, Ponpes Jamilurrohm Glondong, RT 04 Wirokerten Bantul 55194)-d

UNTUK memudahkan pengiriman naskah SST bisa melalui e-mail: www.naskahkr@gmail.com atau WA 0895-6394-11000, ditulis Naskah SST.